



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310  
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374  
[www.bappenas.go.id](http://www.bappenas.go.id)

---

Nomor : B-13447/P.01/DL.03.01/07/2023 Jakarta, 18 Juli 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Lima berkas  
Hal : Pemanggilan Calon Peserta Pelatihan  
Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023

Yth.

1. Kepala Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia Kementerian/Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

Menindaklanjuti surat kami Nomor B-06347/P.01/DL.03.01/03/2023 tanggal 12 April 2023 perihal Penawaran Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama, bersama ini disampaikan bahwa Staf Saudara, sebagaimana daftar terlampir, telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama akan dilaksanakan secara daring pada 7 Agustus hingga 22 September 2023 oleh Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.
2. Selama pelaksanaan Program Pelatihan Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas tersebut, peserta diwajibkan untuk selalu menyalakan video selama proses pelatihan berlangsung dengan tingkat kehadiran minimal 90 persen. Satu sesi = 2 jam pelajaran (jampel), dengan masing-masing jampel berdurasi 45 menit
3. Pemberian sertifikat kelulusan kepada peserta harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a). Memenuhi tingkat kehadiran sebagaimana disebutkan pada poin 2; b). Memenuhi nilai minimum evaluasi pembelajaran (kuis, *post-test*, presentasi, penugasan lainnya baik secara individu maupun berkelompok), serta telah mengisi seluruh kuesioner dari Pusbindiklatren dan penyelenggara pelatihan; dan c). Mengikuti seluruh program pelatihan dengan baik dan dinyatakan memenuhi minimum kehadiran yang ditentukan. Dalam hal peserta gagal memenuhi persyaratan dalam poin a dan b, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan sertifikat keikutsertaan dalam pelatihan
4. Pembiayaan Program Pelatihan Fungsional Perencana Ahli Pertama Beasiswa Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023 melalui mekanisme *cost sharing*. Pusbindiklatren menanggung *tuition fee*, tunjangan paket data dan komunikasi, biaya bahan, biaya sewa ruang meeting virtual serta biaya pengawas sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pelatihan Pusbindiklatren Bappenas. Sedangkan Instansi asal peserta menanggung biaya lain yang tidak ditanggung oleh Pusbindiklatren untuk menunjang pelaksanaan pelatihan.

5. Seluruh...

5. Seluruh calon peserta diwajibkan untuk mengunggah Surat Tugas dan Surat Pernyataan Kesediaan (format terlampir), **selambat-lambatnya pada tanggal 19 Juli 2023** melalui <http://sipena.bappenas.go.id>. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPENA dapat diakses melalui tautan <https://link.bappenas.go.id/panduan-aplikasi-sipena>.
6. Berkaitan dengan hal tersebut, mohon Saudara dapat menyampaikan informasi dan menerbitkan Surat Tugas untuk yang bersangkutan. Informasi lebih lanjut perihal pelaksanaan pelatihan, dapat menghubungi Sdr. Naila Sukma Aisyah melalui email [pusbindiklatren@bappenas.go.id](mailto:pusbindiklatren@bappenas.go.id) atau Sdr. Jeane (CP MPWK ITB) di nomor 08164208069

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan  
dan Pelatihan Perencana,



**Wignyo Adiyoso**

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung;
3. PPK Program PPN X, Kementerian PPN/Bappenas.

Lampiran 1 : Daftar Tujuan  
Nomor : B-13447/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

#### DAFTAR TUJUAN

1. Badan Informasi Geospasial
2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
3. Badan Pengawas Pemilihan Umum
4. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
5. Badan Siber dan Sandi Negara
6. Kementerian Dalam Negeri
7. Kementerian Perdagangan
8. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
9. Kementerian Perhubungan
10. Majelis Permusyawaratan Rakyat
11. Pemerintah Kabupaten Bandung
12. Pemerintah Kabupaten Cirebon
13. Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Lampiran 2 : Hak dan Kewajiban Peserta  
Nomor : B-13447/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

## HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Kewajiban dan tugas dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. menyediakan dokumen pendukung pertanggungjawaban pengeluaran (jika dibutuhkan);
- b. menyiapkan alat pendukung untuk mengikuti pelaksanaan pelatihan;
- c. mengikuti seluruh rangkaian agenda pelaksanaan program pelatihan sesuai dengan ketentuan;
- d. mengikuti pelatihan dengan minimal tingkat kehadiran sesuai ketentuan, yakni minimal 90 persen dari jumlah jam pelajaran;
- e. dalam hal berhalangan atau perlu meninggalkan kegiatan pelatihan karena kepentingan pribadi yang mendesak, peserta wajib mendapatkan izin dari pelaksana pelatihan;
- f. menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren apabila tidak mengikuti ketentuan yang berlaku selama pelatihan;
- g. mengisi kuesioner pelaksanaan pelatihan yang ditentukan oleh Pusbindiklatren;
- h. menyampaikan/mengunggah surat tugas dan surat kesediaan mengikuti pelatihan (Lampiran 4);

Adapun hak dari peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pelatihan sesuai kurikulum;
- b. mendapatkan bahan pelatihan;
- c. mendapatkan akun dan akses ke dalam Sipena;
- d. mendapat dokumen kelulusan/penyelesaian pelatihan sesuai dengan ketentuan tiap-tiap pelatihan

Lampiran 3 : Hak dan Kewajiban Instansi  
Nomor : B-13447/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

### **HAK DAN KEWAJIBAN INSTANSI PESERTA PELATIHAN**

Kewajiban dan tugas dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. memberikan dukungan kelengkapan dokumen administrasi pelatihan yang disyaratkan Pusbindiklatren dan atau pelaksana pelatihan; serta
- b. memberikan dukungan pembiayaan (*co-funding*) sesuai dengan kebutuhan dengan merujuk kepada Surat Edaran (SE) Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembiayaan Bersama (*cost sharing*) Dalam Penyelenggaraan Program Beasiswa Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun hak dari instansi pengirim peserta pelatihan adalah sebagai berikut

- a. mendapatkan peserta yang telah memiliki kompetensi di bidang perencanaan sesuai dengan jenjangnya untuk Pelatihan Fungsional Perencana;
- b. mendapatkan informasi terkait pelaksanaan pelatihan dari Pusbindiklatren dan/atau pelaksana pelatihan.

Lampiran 4 : Surat Kesediaan Peserta  
Nomor : B-13447/P.01/DL.03.01/07/2023  
Tanggal : 18 Juli 2023

**SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN PESERTA PROGRAM PELATIHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....  
NIP :.....  
Pangkat/Golongan :.....  
Jabatan :.....  
Alamat Kantor :.....  
Telp :.....email resmi kantor (\*\*.go.id).....  
No Handphone :.....email pribadi (\*\*\*.com).....  
Pelatihan :.....  
Pelaksana Pelatihan :.....

Menyatakan bahwa:

1. Bersedia untuk mengikuti Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023. Apabila saya **mengundurkan diri setelah batas waktu** yang ditetapkan dalam surat pemanggilan, saya bersedia mengganti seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pusbindiklatren dalam pelaksanaan Beasiswa Program Pelatihan Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2023.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses pelatihan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan Pusbindiklatren Bappenas dan Pelaksana Pelatihan, termasuk tidak melaksanakan pekerjaan rutin di kantor selama pelatihan berlangsung.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Pimpinan Instansi (Minimal Eselon II)

Yang Berjanji,

(Cap Basah stempel)

(Tanda tangan dan Meterai 10.000)

(.....)  
NIP.

(.....)  
NIP.

Lampiran 5 : Daftar Nama Peserta

Nomor : B-13447/P.01/DL.03.01/07/2023

Tanggal : 18 Juli 2023

### DAFTAR PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
1	Aisyah Fathul Jannah	199612262022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat	Kota Jakarta Pusat	DKI
2	Aldi Nur Salam	199405062020121011	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan		JABAR
3	Anisa Rospita Dewi	199202202020122008	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Kesehatan	Kota Bandung	JABAR
4	Ari Annisa Sekar Pramitha	199509032020122013	Kementerian Dalam Negeri	DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	Kota Jakarta Pusat	DKI
5	Bara Lintang Sanggabuana	199305202020121001	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	DIREKTORAT DERADIKALISASI	Kabupaten Bogor	JABAR
6	Efita Mey Lina	199205052020122001	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kota Jakarta Pusat	DKI
7	Emhaka Yudhistira	199311242022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	Kota Jakarta Pusat	DKI
8	Erna Soelina	198909012020122005	Kementerian Perhubungan	Direktorat Sarana Perkeretaapian	Kota Jakarta Pusat	DKI

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
9	Fajar Muhammad Pramudia	199808122022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pengembangan Pendanaan Pembangunan	Kota Jakarta Pusat	DKI
10	Faris Ady Nugroho	199303032020121018	Kementerian Dalam Negeri	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa	Kota Jakarta Selatan	DKI
11	Ilham Romadona	199503022020121010	Kementerian Perdagangan	Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdag	Kota Jakarta Pusat	DKI
12	Ivan Stefanus	199406062022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pendidikan Tinggi dan Iptek	Kota Jakarta Pusat	DKI
13	Kevan Cahyadi Alam	199406042019021002	Badan Siber dan Sandi Negara	Bagian Perencanaan	Kota Depok	JABAR
14	Kurniawati	199206122020122012	Kementerian Dalam Negeri	SEKRETARIAT DITJEN BINA PEMERINTAHAN DESA	Kota Jakarta Selatan	DKI
15	Luqman Hakim Antris Saputro	199502172022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Pusbindiklatren	Kota Jakarta Pusat	DKI
16	M. Arif Apriwijaya	199704172020121001	Badan Pengawas Pemilihan Umum	Biro Perencanaan Dan Organisasi	Kota Jakarta Pusat	DKI
17	Mira Prayuningtias	199605302019032006	Pemerintah Kabupaten Bandung	Bappelitbangda	Kabupaten Bandung	JABAR
18	Muhammad Nashiruddin	199807182022021001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan	Kota Jakarta Pusat	DKI
19	Nabila Dety Novia Utami	199611172020122011	Badan Informasi Geospasial	Biro Perencanaan, Kepegawaian dan Hukum	Kabupaten Bogor	JABAR

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN





NO	NAMA	NIP	INSTANSI	UNIT KERJA	KOTA/KAB	PROV
20	Nadiyah Hazimah Nur Jilan	199602252020122017	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	Dinas Sumber Daya Air	Kota Bandung	JABAR
21	Nawang Anandhini	199801282022022001	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat SPPEPP	Kota Jakarta Selatan	DKI
22	Nur Fauziah Rahmawati	199012042020122005	Pemerintah Kabupaten Cirebon	Bappelitbangda	Kabupaten Cirebon	JABAR
23	Pusphita Anna Octaviani	199110172020122016	Kementerian Perdagangan	Sekretariat Ditjen Pen	Kota Jakarta Pusat	DKI
24	Triana Kusuma Lestari	199208022020122027	Kementerian Perdagangan	Sekretariat Badan Kebijakan Perdagangan	Kota Jakarta Pusat	DKI
25	Triyo Utomo	199105072020121007	Majelis Permusyawaratan Rakyat	Biro Perencanaan dan Keuangan	Kota Jakarta Pusat	DKI

 **Perhatian:** Dilarang Memberikan Sesuatu yang Dapat Mengakibatkan KKN



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN